



# RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN ANGGARAN 2020



**DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN**

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Telp. (031)3095361 / Fax. (031)3095361

E-mail : [dinsos@bangkalankab.go.id](mailto:dinsos@bangkalankab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, .....

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANGKALAN

**Drs. SETIJABUDHI NK, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196003011985021004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi .....	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	20
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	22
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	25
4.1 Program dan Kegiatan	
BAB V PENUTUP .....	30

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja 2020 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahab Kedua Atas Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 25/E);
- n. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2020 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2020 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 serta evaluasi kinerja di tahun 2020 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.

2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial dan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2019-2023 dan RKPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2020 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2020.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

#### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial**  
**Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program (outcome) dan Keluaran Kegiatan (output) s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</i>									
1.06	<i>Urusan Sosial</i>									
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelayanan sosial	912 org	1942 org	626 org	626 org	100	750 org	3.318 org	3,6
1.06.15.2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Peserta pelatihan dan stimulan untuk keluarga miskin ( perkotaan)	48	90 org	30 org	30 org	100	40 org	160 org	3,3

1.06.15.6	Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peserta pelatihan dan stimulan bagi fakmis (pesisir)	48	0 org	28 org	28 org	100	40 org	68 org	1,4
1.06.15.8	Fasilitasi Pemenuhan kebutuhan Dasar bagi keluarga Miskin	Bantuan sembako untuk keluarga miskin	766	1.852 pkt	540 pkt	540 pkt	100	630 pkt	3.022 pkt	3,9
1.06.15.9	Pengadaan sarana Pendukung usaha bagi Keluarga Miskin	Sarpras pendukung usaha bagi keluarga miskin (pedesaan)	48	0 orgt	28 org	28 org	100	40 org	68 org	1,4
<b>1.06.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan kegiatan tanggap bencana alam dan bencana sosial</b>	<b>3 keg</b>	<b>2 keg</b>	<b>3 keg</b>	<b>3 keg</b>	<b>100</b>	<b>3 keg</b>	<b>8 keg</b>	<b>2,7</b>
1.06.16.10	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Distribusi air bersih untuk daerah rawan kekeringan	14 kec	14 kec	14 kec	0	0	14 kec	14 kec	1,0
1.06.16.12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH)	Koordinasi pelayanan keluarga miskin terhadap kesehatan dan pendidikan	18 kec	0	18 kec	18 kec	100	18 kec	36 kec	2,0
1.06.16.13	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar (pangan) Bagi Korban Bencana	Bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial	2 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0	2 keg	2 keg	0,0

1.06.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	34 org	98 org	0 org	0 org	0	19 org	117 org	3,4
1.06.17.8	Bimbingan motivasi dan bantuan stimulan bagi Anak terlantar	Peserta pembinaan serta stimulan untuk anak terlantar	34 org	98 org	0 org	0 org	0	19 org	117	3,4
1.06.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah Paca yang mendapatkan pelayanan sosial	30 org	100 org	0 org	0 org	0	19 org	119 org	4,0
1.06.18.6	Bimbingan Motivasi dan bantuan stimulan untuk para penyandang cacat dan Trauma	Bimbingan dan stimulan untuk PACA	30 org	100 org	0 org	0 org	0	19 org	119	4,0
1.06.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	3 keg	3,0
1.06.20.6	Penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)	Razia PMKS	5 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100	5 kali	9	1,8

<b>1.06.19</b>	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	<b>Jumlah panti asuhan/yayasan yang mendapatkan bantuan/pembinaan</b>	<b>6 yys</b>	<b>1 yys</b>	<b>0 yys</b>	<b>0 yys</b>	<b>100</b>	<b>4 yys</b>	<b>5</b>	<b>0,8</b>
<b>1.06.19.4</b>	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Pembinaan dan stimulan untuk panti asuhan	6 yys	1 yys	0 yys	0 yys	0	0 yys	1	0,2
<b>1.06.21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelembagaan kesos</b>	<b>3 keg</b>	<b>1 keg</b>	<b>1 keg</b>	<b>1 keg</b>	<b>100</b>	<b>2 keg</b>	<b>4 keg</b>	<b>1,3</b>
<b>1.06.21.5</b>	Sosialisasi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Peserta sosialisasi	61 org	0	0	0	0	100 org	100	1,6
<b>1.06.21.6</b>	Penyuluhan dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial ( PMKS)	Data PMKS	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3	3,0
<b>1.06.21.8</b>	Validasi Dan Verifikasi Data kemiskinan	Database kemiskinan	1 dok	0	1 dok	0 dok	0	1 dok	1	1,0
<b>1.06.22</b>	<b>Program Kelembagaan Kesejahteraan sosial</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan kegiatan kelembagaan kesos</b>	<b>2 keg</b>	<b>1 keg</b>	<b>1 keg</b>	<b>1 keg</b>	<b>100</b>	<b>2 keg</b>	<b>2 keg</b>	<b>1,0</b>

1.06.22.4	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan (TMP)	Rehab pagar TMP	1 lok	1 lok	1 lok	1 lok	100	1 keg	3	3,0
1.06.22.5	Fasilitasi KOMDA Lansia	Operasional Komda Lansia	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	3	3,0
0.00	<b>Urusan Kesekretariatan</b>									
0.00.2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarpras aparatur yang layak fungsi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1,0
0.00.2.22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung Kantor	Perbaiki ruangan tempat kerja	1 lok	0 lok	1 lok	1 lok	100	1 lok	1 lok	1,0
0.00.2.47	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kantor	7 jenis	2 jenis	6 jenis	6 jenis	100	7 jenis	7 jenis	1,0
0.00.6	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1,0
0.00.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	laporan capaian kinerja dan keuangan	1 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	4 dok	4,0

0.00.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun	1 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	4	4,0
0.00.7	<b>Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja</b>	<b>Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1,0</b>
0.00.7.1	Penunjang Operasional OPD	Tersedianya sarana operasional OPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	1,0
0.00.7.18	Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Peserta peringatan hari kesaktian	150 org	150 org	150 org	150 org	100	150 org	150 org	1,0
0.00.7.20	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi bangkalan	Keikutsertaan dalam pameran	1 lok	1 lok	1 lok	1 lok	100	1 lok	1 lok	1,0
0.00.7.21	Fasilitasi Peringatan Hari Pahlawan	Peserta peringatan hari Pahlawan	150 org	150 org	150 org	150 org	100	150 org	150 org	1,0
0.00.7.49	Penyusunan Renstra OPD	Dokumen Revisi Renstra	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1,0
0.00.7.60	Penyusunan Dan Evaluasi Renja OPD	Renja OPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1,0

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019 (s/d TW 1)	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	Persentase PMKS yang ditangani	1	6,69	7,81	8,93	1	0	6,69	7,81	

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan sumberdana pembiayaan dalam penanganan kesejahteraan sosial
4. Keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Kompleksitas permasalahan PMKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020**  
**Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani</b>	<b>2,7</b>	<b>411.486.250</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>		<b>Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani</b>	<b>2,7</b>	<b>411.486.250</b>	<b>Yang betul di renstra Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Bkl	<i>Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhabilitasi</i>	61 org	154.105.000	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Bkl	<i>Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhabilitasi</i>	61 org	154.105.000	
2	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Bkl	<i>Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi</i>	121 org	166.500.000	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Bkl	<i>Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi</i>	121 org	166.500.000	
3	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Bkl	<i>Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi</i>	38 org	90.881.250	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Bkl	<i>Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi</i>	38 org	90.881.250	
<b>B</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>0,6</b>	<b>948.696.750</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>0,6</b>	<b>948.696.750</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Sosial</b>
4	Penanganan Fakir Miskin	Bkl	Jumlah fakir miskin yang dibina	126 org	159.731.250	Penanganan Fakir Miskin	Bkl	Jumlah fakir miskin yang dibina	126 org	159.731.250	

			Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	662 org	165.000.000			Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	662 org	165.000.000	
			Dokumen penerima rastra	1 dokumen	201.225.000			Dokumen penerima rastra	1 dokumen	201.225.000	
5	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Bkl	Jumlah sarana yang dipelihara	1 lokasi	47.250.000	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Bkl	Jumlah sarana yang dipelihara	1 lokasi	47.250.000	
			Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 keg	83.740.500			Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 keg	83.740.500	
6	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Bkl	Jumlah lembaga yang dibantu	5 yayasan	141.750.000	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Bkl	Jumlah lembaga yang dibina	5 yayasan	141.750.000	
			Jumlah TKSK yang terbina	18 orang				Jumlah TKSK yang terbina	18 orang		
7	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Bkl	Peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan	50 orang	150.000.000	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Bkl	Peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan	50 orang	150.000.000	
<b>C</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>100</b>	<b>2.270.295.760</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>100</b>	<b>2.270.295.760</b>	<b>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>
8	Perlindungan sosial korban bencana alam	Bkl	persentase korban bencana alam yang dibantu	100	196.275.000	Perlindungan sosial korban bencana alam	Bkl	persentase korban bencana alam yang dibantu	100	196.275.000	
			Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	89 desa	86.950.000			Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	89 desa	86.950.000	
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bkl	Dokumen penerima KPM	1 dokumen	157.680.250	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bkl	Dokumen penerima KPM	1 dokumen	157.680.250	

			Jumlah penerima JKN	479.000 org	251.105.000			Jumlah penerima JKN	479.000 org	251.105.000	
			Data kemiskinan	1 dokumen	1.540.785.510			Data kemiskinan	1 dokumen	1.540.785.510	
10	Perlindungan sosial korban bencana sosial	Bkl	% korban bencana sosial yang dibantu	100%	37.500.000	Perlindungan sosial korban bencana sosial	Bkl	% korban bencana sosial yang dibantu	100%	37.500.000	
<b>D</b>	<b>Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	<b>6</b>	<b>159.437.500</b>	<b>Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	<b>6</b>	<b>159.437.500</b>	<b>Bidang Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>
11	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Bkl	Jumlah LKS yang dibantu	5 LKS	60.156.250	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Bkl	Jumlah LKS yang dibantu	5 LKS	60.156.250	
12	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Bkl	Jumlah PSM yang telah dibina	53 PSM	62.281.250	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Bkl	Jumlah PSM yang telah dibina	53 PSM	62.281.250	
13	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bkl	Jumlah PSKS yang dibina	21 org	37.000.000	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bkl	Jumlah PSKS yang dibina	21 org	37.000.000	
<b>E</b>	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>		<b>Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan</b>	<b>100</b>	<b>2.029.489.240</b>	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>		<b>Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan</b>	<b>100</b>	<b>2.029.489.240</b>	<b>Kesekretariatan</b>
14	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Dinsos	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	7 jenis	1.475.885.180	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Dinsos	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	7 jenis	1.475.885.180	
			Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	9 jenis				Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	9 jenis		

15	<b>Kedinasan dalam daerah dan luar daerah</b>	Dinso s	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	25 kali	150.000.000	<b>Kedinasan dalam daerah dan luar daerah</b>	Dins os	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	25 kali	150.000.000	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	80 kali				Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	80 kali		
16	<b>Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah</b>	Dinso s	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	7 dok	5.000.000	<b>Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah</b>	Dins os	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	7 dok	5.000.000	
17	<b>Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>		Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	8 jenis	127.219.560	<b>Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>		Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	8 jenis	127.219.560	
			Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	114 unit				Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	114 unit		
18	<b>Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</b>	Dinso s	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	2 jenis	124.107.375	<b>Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</b>	Dins os	Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	2 jenis	124.107.375	
			Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	4 unit				Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	4 unit		
19	<b>Peningkatan Disiplin Pegawai</b>		Jumlah pakaian aparatur yang diadakan	100 buah	43.217.125	<b>Peningkatan Disiplin Pegawai</b>		Jumlah pakaian aparatur yang diadakan	100 buah	43.217.125	
20	<b>Peningkatan kapasitas aparatur</b>	Dinso s	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	7 org	35.000.000	<b>Peningkatan kapasitas aparatur</b>	Dins os	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	7 org	35.000.000	
21	<b>Penyusunan perencanaan dan informasi PD</b>	Dinso s	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dok	33.750.000	<b>Penyusunan perencanaan dan informasi PD</b>		Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dok	33.750.000	
			Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	4 dok			Dins os	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	4 dok		Kurangnya output kegiatan

			Jumlah data dan informasi PD	2 dok				Jumlah data dan informasi PD	2 dok		
22	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD</b>	Dinso s	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	10 dokumen	8.280.000	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD</b>	Dins os	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	10 dokumen	8.280.000	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	1 laporan				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	1 laporan		
23	<b>Penyusunan laporan keuangan</b>		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	1 laporan	8.280.000	<b>Penyusunan laporan keuangan</b>		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	1 laporan	8.280.000	
24	<b>Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi</b>		Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	1 keg	18.750.000	<b>Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi</b>		Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	1 keg	18.750.000	
					<b>5.819.405.500</b>					<b>5.819.405.500</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur, dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 didasarkan pada program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2020, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

**Tabel 2.4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi**

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dikemukakan bahwa perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil dan program-program pro rakyat telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian kecepatan penurunan kemiskinan mengalami perlambatan.

Dalam rangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu (1) penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif; dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.



### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD**

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.

#### **Tujuan Renja Dinas Sosial**

1. Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan

#### **Sasaran Renja Dinas Sosial**

1. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS
2. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2020	2021			2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PMKS	567.205	567.111	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	% PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	7,81	8,93	
				Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan internal layanan kesekretariatan	100%	100%	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

4.1. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2020 :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.06.</b>	<b>Urusan Sosial</b>								
<b>1.06.01.16.</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani</b>		<b>2,7</b>	<b>411.486.250</b>	<b>APBD</b>	Kurangnya anggaran untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial	<b>2,8</b>	<b>452.634.875</b>
1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan di rehab	Bkl	61 org	154.105.000	APBD		64 org	169.515.500
1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial yang dilayani dan direhabilitasi	Bkl	121 org	166.500.000	APBD		127 org	183.150.000
1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang dilayani dan direhab	Bkl	38 org	90.881.250	APBD		40 org	99.969.375
<b>1.06.01.23.</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>Bkl</b>	<b>0,6</b>	<b>948.696.750</b>	<b>APBD</b>			<b>1.043.566.425</b>
1.06.01.23.01	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang dibina	Bkl	126 org	159.731.250	APBD	Untuk menambah penerima bantuan sosial	132 org	175.704.375
		Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bkl	662 org	165.000.000	APBD	Menurunkan angka kemiskinan	695 org	173.250.000

		Dokumen penerima rastra	Bkl	1 dokumen	201.225.000	APBD	Untuk mewujudkan tujuan PD	1 dokumen	221.347.500
<b>1.06.01.23.02</b>	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	Bkl	1 lokasi	47.250.000	APBD	Menambah petugas cleaning servis dan petugas penggali makam	1 lokasi	51.975.000
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional		2 keg	83.740.500	APBD	Menambah peserta dari masing-masing PD	2 keg	92.114.550
<b>1.06.01.23.03</b>	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	Bkl	5 yayasan	66.150.000	APBD	Meningkatkan kesejahteraan penghuni yayasan	6 yayasan	155.925.000
		Jumlah TKS yang terbina		18 orang	75.600.000	APBD		18 org	
<b>1.06.01.23.04</b>	Pelestarian terhadap nilai-nilai keahlawanan	Peserta sosialisasi nilai-nilai keahlawanan	Bkl	50 orang	150.000.000	APBD		55 org	165.000.000
<b>1.06.01.24.</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>Bkl</b>	<b>100</b>	<b>2.270.295.760</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>2.497.325.336</b>
<b>1.06.01.24.01</b>	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	Bkl	100%	196.275.000	APBD		100	215.902.500
		Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	Bkl	89 desa	86.950.000	APBD		89	95.645.000
<b>1.06.01.24.02</b>	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen penerima KPM	Bkl	1 dokumen	157.680.250	APBD		1	173.448.275
		Jumlah penerima JKN	Bkl	479.000 org	251.105.000	APBD		479.000	276.215.500
		Data kemiskinan	Bkl	1 dokumen	1.540.785.510	APBD		1	1.694.864.061
<b>1.06.01.24.03</b>	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	Bkl	100	37.500.000	APBD		100%	41.250.000
<b>1.06.01.25.</b>	<b>Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>		<b>6</b>	<b>159.437.500</b>		Keterbatasan anggaran tentang pengembangan, publikasi dan penyuluhan sosial	<b>6</b>	<b>175.381.250</b>

1.06.01.25.01.	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	Bkl	5 Lembaga	60.156.250	APBD		5 LKS	66.171.875
1.06.01.25.02.	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang dibina	Bkl	53 org	62.281.250	APBD		55 org	68.509.375
1.06.01.25.03.	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	Bkl	21 org	37.000.000	APBD		22 org	40.700.000
<b>0.00.16.</b>	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan</b>	Dinsos	<b>100</b>	<b>2.029.489.240</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>2.062.763.648</b>
0.00.16.01.	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Bkl	7 jenis	236.095.180	APBD		7	1.619.178.298
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	Bkl	9 jenis	1.239.790.000	APBD			
0.00.16.02.	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	Bkl	25 kali	15.000.000	APBD		30 kali	165.000.000
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		80 kali	135.000.000	APBD		80 kali	
0.00.16.03.	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	Dinsos	14 dok	5.000.000	APBD		14 dok	5.500.000
0.00.16.04.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Dinsos	3 jenis	102.219.560	APBD		3 jenis	133.580.538
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara		1 unit	25.000.000	APBD		1 unit	
0.00.16.05.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	Dinsos	2 jenis	124.107.375	APBD		2 jenis	130.312.744
		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan		0 unit		APBD		4 unit	
0.00.16.06.	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian aparatur yang diadakan	Dinsos	100 buah	43.217.125	APBD	Baju dinas	100	45.377.981

<b>0.00.16.07.</b>	<b>Peningkatan kapasitas aparat</b>	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		7 org	35.000.000		Untuk peningkatan kapasitas ASN	9 org	36.750.000
<b>0.00.16.08.</b>	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Dinsos	3 dok	25.000.000	APBD		3 dok	35.437.500
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)		4 dok	3.750.000			4 dok	
		Jumlah data dan informasi PD	Dinsos	3 dok	5.000.000	APBD		3 dokumen	0
<b>0.00.16.09.</b>	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	Bkl	8 laporan	3.280.000	APBD		8 dokumen	8.694.000
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun		1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	
<b>0.00.16.10.</b>	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	5.796.000	APBD		1 laporan	8.694.000
		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		66 laporan	2.484.000	APBD			
<b>0.00.16.11.</b>	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi		2 keg	18.750.000	APBD		1 keg	19.687.500
	<b>JUMLAH</b>				<b>5.819.405.500</b>				<b>6.368.870.447</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2020 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- b. Program Pemberdayaan Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PMKS sesungguhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan



manusia. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PMKS pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS sekaligus menekan eksekse-ekses yang ditimbulkan. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan ini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan akseibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyediaan pelayanan harus merespon perubahan paradigma dan trend permasalahan sosial yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat (*community base*).
2. Peningkatan kualitas aparatur dalam penyiapan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban penelantaran dan eksploitasi serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2020 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020.

Bangkalan, .....

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bangkalan

**Drs. SETIJABUDHI NK, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196003011985021004